

Arahan Pengembangan Permukiman Suku Bajo di Wilayah Pesisir Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone

Yola Amalia Ayuningsih^{1)*}, Shirly Wunas²⁾, Mimi Arifin³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: yolaamaliaayuningsih10@gmail.com

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: shirly_wunas@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

ABSTRACT

Bajo tribe is in the Bugis tribe community that grows and develops in the coastal area of Bone Regency, forming a dense residential area with a very strong kinship. The purpose of this study, (1) identify the conditions of settlement development (2) explain the settlement service facilities and transportation infrastructure and (3) describe the direction of settlement development based on settlement service facilities and the Bajo Tribe community transportation infrastructure. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are primary data through field surveys (questionnaires, interviews and observations) and secondary data through international surveys (government) and literature studies. The results showed the basic service facilities in the Bajo tribal settlement had fulfilled the standard for livable housing planning, but it was not sufficient from the supporting facilities for its service activities. Road network infrastructure in residential areas has met the accessibility index, but it is not yet adequate from the aspect of connectivity to loading and unloading activities of fish catches. Directions for the development of settlements based on settlement service facilities and transportation infrastructure of the Bajo tribe, namely boat moorings are directed to build docks with simple construction and development of facilities such as fish auction sites so that the quality of the catches is maintained and the sale value can be in accordance with general market prices, and fish drying places integrated with the construction of under the stage house can be equipped with solar energy systems.

Keywords: Coastal, Settlements, Infrastructure, Bajo Tribe

ABSTRAK

Suku Bajo berada dalam komunitas suku bugis yang tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir Kabupaten Bone, membentuk hunian padat dengan kekerabatan sangat kuat. Adapun tujuan dari penelitian ini, (1) mengidentifikasi kondisi pengembangan permukiman (2) menjelaskan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi dan (3) menjabarkan arahan pengembangan permukiman berdasarkan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo Kelurahan Bajoe. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer melalui survei lapangan (kuesioner, wawancara dan observasi) dan data sekunder melalui survei intansional (pemerintah) serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan Sarana pelayanan dasar dalam permukiman suku bajo sudah memenuhi standar perencanaan perumahan layak huni, namun belum memadai dari sarana penunjang kegiatan kenelayannya. Prasarana jaringan jalan dalam kawasan permukiman sudah memenuhi indeks aksesibilitas, tetapi belum memadai dari aspek konektifitas terhadap kegiatan bongkar muat dari hasil tangkapan ikan. Arahan pengembangan permukiman berdasarkan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo yaitu tambatan perahu diarahkan untuk membangun dermaga dengan konstruksi sederhana serta pengembangan sarana seperti tempat pelelangan ikan agar kualitas tangkapan ikan terjaga dan nilai jual dapat sesuai dengan harga pasar secara umum, dan tempat penjemuran ikan yang terpadu dengan konstruksi kolong rumah panggung dapat dilengkapi dengan sistem solar energi.

Kata Kunci: Pesisir, Permukiman, Sarana Prasarana, Suku Bajo

PENDAHULUAN

Penataan ruang yang efektif, tepat dan berkelanjutan saat ini menjadi isu pokok yang terus dipermasalahkan pada semua daerah, hal ini

berkaitan dengan pola pembangunan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan dan layak huni, baik dalam aspek fisik, sosial ekonomi, juga ekologi dan lingkungan.

*Corresponding author. Tel.: +62-853-9510-5883
Jalan Poros Malino km. 6 Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan, Indonesia, 92711

Terbentuknya permukiman komunitas suku Bugis dan suku Bajo di Bone di latarbelakangi oleh sebagian besar masyarakat yang mempunyai sumber mata pencaharian sebagai nelayan. Mereka membentuk permukiman kampung nelayan untuk memudahkan aksesibilitas terhadap kegiatan sehari-hari sebagai nelayan, mulai dari penangkapan ikan ataupun hasil-hasil laut lainnya sampai pada pemasaran, Semuanya dilakukan di kampung. Permasalahan yang terjadi ialah permukiman yang tidak tertata, terkesan kumuh, sarana sanitasi yang belum memadai dan tidak terdapatnya tempat pembuangan sampah, Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kawasan permukiman suku Bajo ini terus berkembang sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim serta kebutuhan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menganggap penting untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai kondisi pengembangan permukiman masyarakat suku Bajo dan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone sebagai salah satu alternatif yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah untuk menanggulangi masalah perencanaan permukiman pesisir, guna melestarikan alam dan budaya. Maka dirumuskan pertanyaan penelitian: 1) bagaimana kondisi pengembangan permukiman masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone? 2) bagaimana sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe? dan 3) bagaimana arahan pengembangan permukiman Suku Bajo berdasarkan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi pada wilayah pesisir Kelurahan Bajoe?

TINJAUAN PUSTAKA

Kriteria umum kawasan permukiman antara lain: 1) tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya; 2) mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain; 3) mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun

hujan yang lebat sekalipun; 4) mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah; 5) dilengkapi dengan fasilitas air kotor/tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal; 6) permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman; dan 7) dilayani oleh sarana dan prasarana lingkungan.

Di dalam pendeskripsian interaksi spasial di daratan, secara spasial aspek keterkaitan digambarkan melalui unsur jaringan prasarannya (jaringan jalan raya, jaringan rel kereta api, dan lain-lain), sarana angkutan (bis, kendaraan roda empat, sepeda motor, dan lain-lain), objek yang dialirkan (orang/-penumpang, barang, jasa, informasi, dan lain-lain), besaran aliran (jumlah kendaraan, jumlah orang/penumpang, volume barang, nilai barang/jasa yang dialirkan, dan lain-lain), hingga aspek tujuan/maksud dari interaksi yang dituju (tujuan pergi bekerja, distribusi pemasaran output barang/jasa, tujuan-tujuan sosial, bersekolah/-pendidikan, dan lain-lain).

Permukiman penduduk terkonsentrasi dengan skala yang berbeda-beda. Dalam dimensi yang lain, kota sebagai bentuk konsentrasi yang kompleks, memiliki ukuran luasan area, jumlah penduduk, jumlah perputaran beredar, total nilai barang dan jasa (PDRB) juga berbeda-beda. Pola pemanfaatan ruang dicerminkan dengan gambaran pencampuran atau keterkaitan spasial antar sumberdaya dan pemanfaatannya. Pada kawasan perdesaan, dicirikan dengan dominasi *mixture* (pencampuran) antar pola ruang lanskap alamiah (*natural landscape*), aktivitas-aktivitas pertanian, dan pengelolaan sumberdaya alam, penambangan. Sedangkan kawasan perkotaan dicirikan oleh pencampuran yang lebih rumit antara aktivitas jasa komersial dan permukiman.

Hubungan Komponen Tata Ruang Dengan Permukiman Sebagai Lingkungan Binaan

Pertama, penataan ruang (*spasial planning*) merupakan proses pengalihan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan fungsional tertentu. *Kedua*, penataan ruang bagi aktivitas seperti untuk

tempat bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi.

Permukiman sebagai suatu kawasan yang memiliki 3 komponen pokok yaitu: 1) *place* – temat tinggal; *Doxiadis*, mengemukakan bahwa permukiman manusia (*human settlement*) merupakan suatu totalitas lingkungan yang terbentuk oleh unsur-unsur; 2) '*nature*' (alami), yaitu bahwa permukiman akan sangat ditentukan oleh adanya alam baik sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumber daya seperti unsur fisik dasar (iklim, topografi, hidrologi, vegetasi dan fauna); dan 3) '*society*' (masyarakat) bahwa permukiman pada hakikatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat;

Jadi pola ruang yang dimaksud yakni pola pengembangan permukiman yang meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Penanganan permukiman kumuh perkotaan dilak-

sanakan melalui fasilitas dan bantuan stimulant dalam bentuk bantuan teknik dan infrastruktur bidang permukiman kepada pemerintah daerah dalam menangani permukiman kumuh di daerahnya. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dilaksanakan dengan pola-pola penanganan berupa: (a) pemugaran, (b) peremajaan; atau (c) permukiman kembali. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui pengembangan kawasan perdesaan potensial dan kawasan agropolitan/minapolitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu gejala atau fenomena dengan menggunakan logika ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dimulai sejak mengikuti mata kuliah *Labo Education (LBE) Housing and Settlement* pada September 2018 dan dilanjutkan selama berada di Studio Akhir dimana lokasi penelitian berada di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 1. Lokasi penelitian
Sumber: Google earth diolah ole penulis, 2019

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer melalui survei lapangan (kuesioner, wawancara dan observasi) serta data sekunder melalui survei intansional (Pemerintah) dan studi literatur. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis spasial dengan alat analisis *ArcGis 10.1*. dan analisis

komparatif. Analisis spasial dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi pengembangan permukiman Suku Bajo serta sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi yang ada kemudian disajikan dalam bentuk data citra udara Kabupaten Bone. Peta ini untuk mengetahui arahan pengembangan permukiman Suku Bajo di

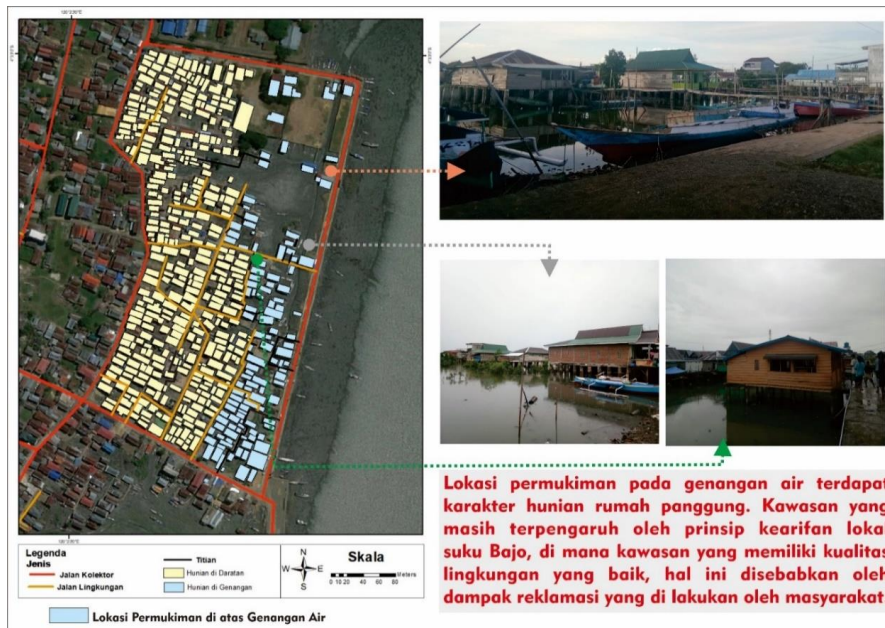
Kelurah-an Bajoe Kabupaten Bone. Sedangkan peta Pelayanan sarana dan prasarana untuk mengetahui ketersediaan sarana pelayanan dan prasarana transportasi yang ada di lingkungan bajo. Kemudian hasilnya akan menentukan arahan pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

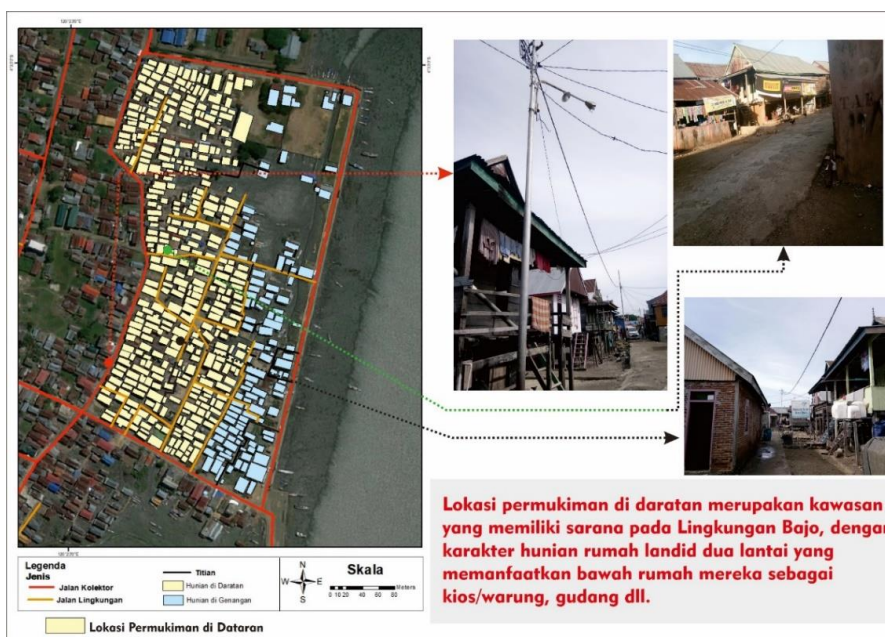
Dalam hal ini zonasi penerapan di bagi dalam 2 kawasan pada Lingkungan Bajo, di mana kawasan pada Lingkungan Bajo terdiri dari hunian di atas

genangan air merupakan kawasan yang masih terpengaruh oleh prinsip kearifan lokal suku Bajo, berdasarkan hasil observasi di lapangan hunian yang berada pada genangan air 23% Karakteristik bangunannya merupakan rumah panggung dengan pola menyebar.

Kawasan unit hunian yang berada pada wilayah daratan merupakan kawasan yang memiliki Sarana pada Lingkungan Bajo, berdasarkan hasil observasi di lapangan hunian yang berada pada daratan 77% karakteristik bangunannya merupakan rumah landed dengan pola berkelompok.



Gambar 2. Lokasi Permukiman di atas Genangan Air
 Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019

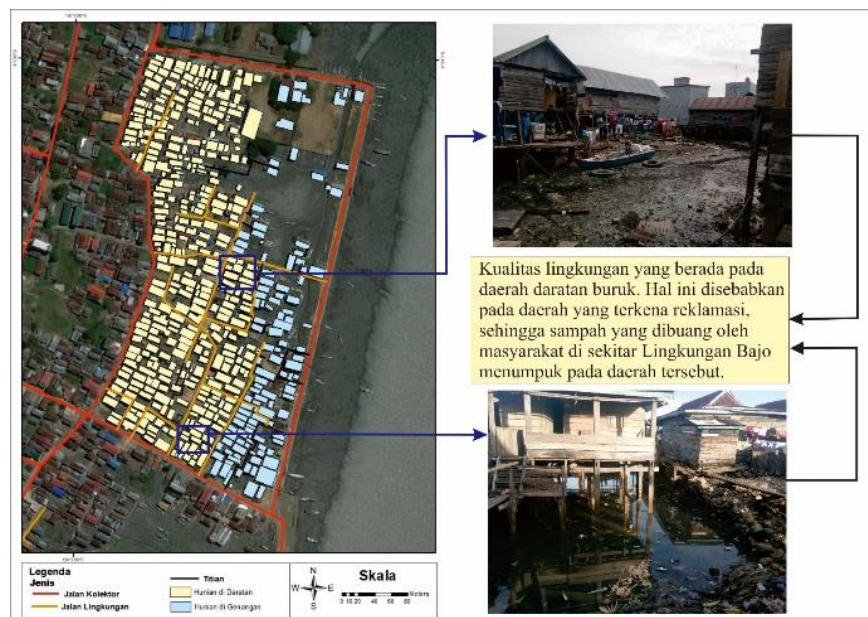


Gambar 3 Lokasi Permukiman di daratan
 Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019

Nature (Alam) Lingkungan Permukiman Suku Bajo

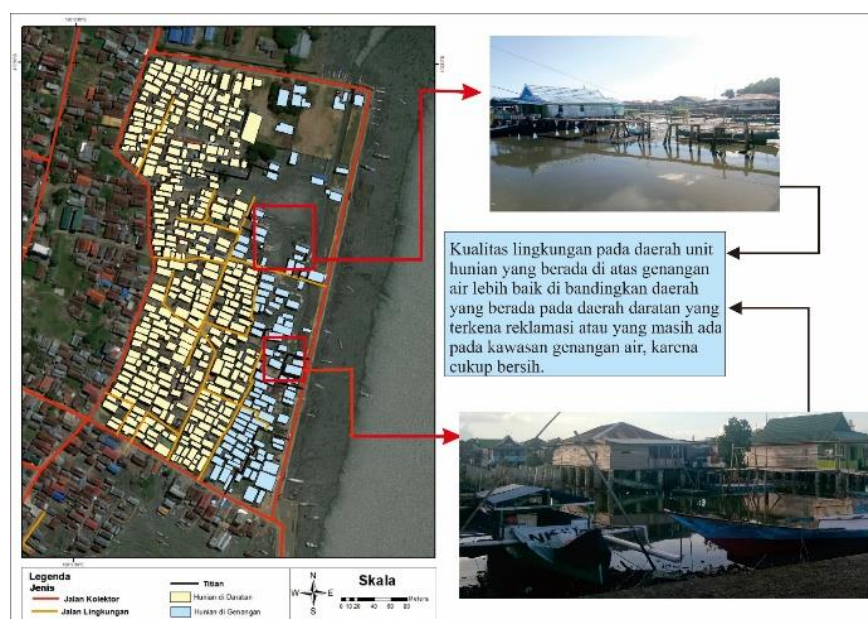
Kualitas lingkungan permukiman Suku Bajo akibat tidak adanya tempat pembuangan sampah dapat dilihat pada gambar 3. Pada daerah peralihan antara permukiman yang terkena dampak sedimentasi dan daerah yang terkena dampak reklamasi. Sedangkan kondisi lingkungan untuk daerah permukiman yang berada pada daerah genangan air dapat dilihat pada gambar 4. Dari gambar 3 dan 4, dapat di lihat bahwa kualitas lingkungan pada daerah yang berada di daratan lebih baik di dibandingkan daerah yang berada pada

daerah peralihan yang terkena relamasi atau yang masih ada pada kawasan genangan air. Hal ini disebabkan pada daerah yang terkena reklamasi, reklamasi dilakukan oleh warga di Lingkungan Bajo sendiri, sehingga daratan yang terjadi menjadi tidak datar dan disertai pembangunan jalan yang tidak memperhitungkan sirkulasi air laut, sehingga sampah yang di buang oleh masyarakat di sekitar Lingkungan Bajo menumpuk pada daerah tersebut. Begitu pula sampah yang berada di permukaan daratan akan menuju ke daerah tersebut dan akan tersimpan ketika air mulai surut.



Gambar 4. Analisis Kualitas Lingkungan di daratan

Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019



Gambar 5 Analisis Kualitas Lingkungan di atas genangan air

Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019

Society (masyarakat)

Tabel 1. Hubungan kekerabatan dalam proses pembangunan perumahan suku Bajo

Kekerabatan	N	Persentase (%)
Orang Tua & Anak	30	36%
Saudara/ Keluarga Jauh	33	40%
Tidak memiliki hubungan	20	24%
Total	83	100

Dalam pola ruang permukiman Suku Bajo dilihat dari kekerabatan kelompok hunian Suku dimana, sistem kekerabatan mempengaruhi morfologi rumah pada Lingkungan Bajo. Hal ini didasarkan dari pengisian angket oleh responden. Dilihat pada diagram diatas menunjukkan kekerabatan dalam lokasi hunian lebih banyak terhadap keluarga dan anak dengan jumlah penduduk sebanyak 30 dengan persentasi 36%.



Gambar 6. Analisis hubungan kekerabatan kelompok hunian Suku Bajo
Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019

Analisis Sarana Pelayanan Permukiman dan Prasarana Transportasi Masyarakat

Pusat pelayanan dilihat dari jumlah sarana yang ada dalam lingkungan bajo, kelurahan bajoe. meliputi pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan peribadatan.

Tabel 2. Jumlah sarana pelayanan Suku Bajo

No.	Sarana	Jumlah
1.	Pendidikan	1
2.	Perkantoran	0
3.	Peribadatan	1
4.	Kesehatan	0
5.	Perdagangan	19



Gambar 7 Peta analisis pusat sarana pelayanan lingkungan Bajo
Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019

Transportasi Laut

Terdapat dua akses jalan lingkungan dan akses jalan titian yang dibuat oleh warga dari kayu, akses jalan titian ini berada pada permukiman di atas air. Jadi rumah landed aksesnya melalui jalan lingkungan ke jalan utama untuk menuju ke dermaga, sedangkan masyarakat yang masih diatas air (rumah panggung) aksesnya melalui jalan titian. Dengan jarak tempuh <500 m.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan beberapa nelayan diketahui bahwa sebagian besar para nelayan memarkir perahunya di pinggir tanggul yang berada disekitar pesisir pantai. Tanggul ini berfungsi sebagai tempat bersandarnya perahu. Tanggul ini belum dikatakan baik karena sirkulasi keluar masuknya perahu belum optimal sehingga nelayan menambatkan perahunya disembarang tempat disekitar pesisir.

Pada permukiman nelayan suku bajoe terdapat salah satu kanal yang berfungsi sebagai lalu lintas air bagi masyarakat permukiman nelayan. Kanal yang berada dipermukiman nelayan suku bajoe

mengalami pendangkalan terutama ketika air laut surut sehingga perahu nelayan yang parkir akan kandas. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan kanal belum optimal karena kondisinya buruk dan tidak dapat lagi di lalui oleh perahu-perahu nelayan, oleh karena itu masyarakat suku bajo hanya memanfaatkan kanal ini pada saat memperbaiki perahu nelayan mereka.

Ada dua pola pergerakan sirkulasi perahu nelayan Suku Bajo yaitu pola masuk perahu dari arah utara ke selatan dan pola keluar perahu dari arah selatan ke utara. Sirkulasi perahu nelayan suku bajo berada di sisi timur berdekatan dengan pesisir pantai yang memudahkan sirkulasi menuju ke penambatan perahu.

Transportasi Darat

Tabel 3. Kondisi fisik jalan pada lingkungan Suku Bajo

Kondisi Jalan	N	Persentase (%)
Rusak	28	34%
Berlubang	30	36%
Baik	25	30%
Total	83	100



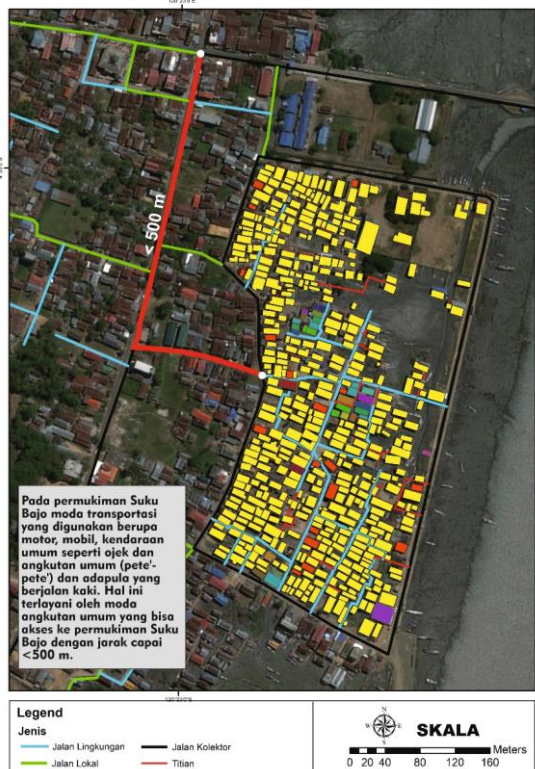
Gambar 8 Peta Analisis Kondisi Fisik Jalan di Lingkungan Bajo

Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019

Pada permukiman Suku Bajo moda transportasi yang digunakan berupa motor, mobil, kendaraan umum seperti ojek dan angkutan umum (*pete'-pete'*) dan adapula yang berjalan kaki. Hal ini terlayani oleh moda angkutan umum yang bisa akses ke permukiman Suku Bajo dengan jarak capai <500 m. Untuk jumlah penggunaan jenis-jenis moda transportasi pada Permukiman Suku Bajo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah transportasi yang digunakan di lingkungan Bajo

Moda	N	Persentase (%)
Tranportasi Pribadi	58	70%
Tranportasi Umum	15	18%
Jalan Kaki	10	12%
Total	83	100



Gambar 9. Peta analisis jarak moda transportasi
 Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019

Arahan Pengembangan Permukiman

Dari kedua tujuan penelitian sebelumnya yaitu mengidentifikasi kondisi pengembangan permukiman masyarakat suku bajo di kelurahan bajoe kabupaten bone dan menjelaskan pelayanan sarana permukiman dan prasarana transportasi

masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe maka disusunlah tujuan penelitian yang ketiga yaitu menjabarkan arahan pengembangan ruang permukiman suku bajo pada wilayah pesisir kelurahan bajoe adalah perencanaan tambatan perahu dan pengembangan sarana.

Tambatan perahu terdapat pada sepanjang pesisir dan di sekitar hunian dari komunitas suku bajo. Kanal setempat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air (perahu nelayan). Oleh sebab itu kanal perlu diper-tahankan sebagai identitas kawasan permukiman suku bajo. Tambatan perahu diarahkan untuk membangun dermaga dengan konstruksi sederhana yang mempertimbangkan arus gelombang air, dan tinggi air pasang (lihat ilustrasi scenario)

Arahan pengembangan lokasi sarana kegiatan yang mendukung aktivitas masyarakat nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone. Hal ini bertujuan untuk lebih memperat hubungan kekerabatan antar masyarakat nelayan, dalam hal ini arahan peruntukan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjemuran ikan selain itu menghidupkan kembali fungsi lama yang telah menurun seperti adanya lapangan di Lingkungan Bajo.

Majoritas masyarakat suku bajo adalah nelayan, hasil tangkapan ikan berlimpah, dikumpulkan di kolong rumah sebelum dipasarkan, oleh sebab itu dibutuhkan tempat pelelangan ikan, agar kualitas tangkapan ikan terjaga dan nilai jual dapat sesuai dengan harga pasar secara umum.

Penjemuran ikan, dominan dilakukan di bahu jalan, belum terdapat kepedulian kualitas produksi ikan kering, dan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan ruang penjemuran ikan yang terpadu dengan konstruksi kolong rumah panggung, dapat dilengkapi dengan *system solar sell*.



Gambar 10. Peta arahan pengembangan
 Sumber: Google earth diolah oleh penulis, 2019

KESIMPULAN

Pengembangan permukiman Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone jika ditinjau dari aspek place, terdapat hunian pada wilayah daratan dominan sudah merupakan rumah *landed*, berkembang secara konsentris (kelompok). Sebaliknya rumah bentuk panggung yang terdapat di atas air, berkembang secara menyebar, tidak teratur. Karakteristik tersebut juga menunjukkan kondisi dari aspek society, yang mana komunitas hunian di atas air mempunyai ikatan kekerabatan yang sangat kuat, membentuk hunian padat, dengan jarak antar rumah $\pm 0,50-1,00m$. Pengembangan permukiman dari aspek nature, dominan masyarakat suku bajoe belum peduli terhadap kesehatan lingkungan, utamanya pada wilayah daratan terdapat timbunan sampah yang terbawa dari air pasang.

Sarana pelayanan dasar dalam permukiman suku bajo sudah memenuhi standar perencanaan perumahan layak huni, namun belum memadai dari sarana penunjang kegiatan kelelayannya. Prasarana jaringan jalan dalam ka-wasan

permukiman sudah memenuhi indeks aksesibilitas, tetapi belum memadai dari aspek konektifitas terhadap kegiatan bongkar muat dari hasil tangkapan ikan.

Arahan pengembangan permukiman berdasar-kan sarana pelayanan permukiman dan pra-sarana transportasi masyarakat Suku Bajo yaitu tambatan perahu diarahkan untuk mem-bangun dermaga dengan konstruksi sederhana serta pengembangan sarana seperti tempat pelelangan ikan agar kualitas tangkapan ikan terjaga dan nilai jual dapat sesuai dengan harga pasar secara umum, dan tempat penje-muran ikan yang terpadu dengan konstruksi kolong rumah panggung, dapat dilengkapi dengan system *solar energy*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baun Issabel Paula (2008). *Kajian Pengemabangan Pemanfaatan Ruang Terbangun di Kawasan Pesisir Kota Kupang*. Semarang.
- Baharuddin, Suratman (2011). *Pergeseran Nilai Tradisonal Suku Bajo Dalam Perlindungan dan Pemenfaatan Sumberdaya Laut Tamn Nasional Wakatobi*. Bogor.

- Dirjen Cipta Karya Departemen PU No.43/Kpts/Ck/1999 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Perumahan Nelayan.
- Gobang, Ambrosius A. K. S. (2017). *Perkembangan Spasial Hunian Skuk Bajo di Kampung Wuring Kota Maumere*. Nusa Tenggara Timur.
- Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005).
- Permen 15 Perumahan Rakyat RI No.15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63/PRT/1993 tentang *Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai Penentuan Klasifikasi Jalan di Kawasan Perkotaan Nomor Pd.T-18-2004-B*.
- Santi, dkk (2015). *Pola Pemanfaatan Ruang Permukiman Masyarakat Bajo di Desa Lemo Bajo Kabupaten Konawe Utara Sebagai Arah Penataan Kawasan Permukiman Pesisir*. Sulawesi Tenggara.
- Wunas, Shirly (2011). *Kota Humanis: Integrasi Lahan dan Transportasi di Wilayah Suburban*. Surabaya: Brilian Internasional.